

PERAN FORUM KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS DI KOTA KENDARI

Maya Sastika¹, Faizah Binti Awad², Aminudin³, Samsuri⁴

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

mayasastika2703@gmail.com¹, izzahawad@gmail.com², aminudinkendari@gmail.com³,

samsuri7180@gmail.com⁴

Abstrak: Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis peran Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) sebagai organisasi profesi dalam meningkatkan kinerja dan pelaksanaan kegiatan Penyuluh Agama Islam (PAI) Non-PNS di Kota Kendari. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota aktif FKPAI Kendari, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa FKPAI berperan signifikan dan multifaset melalui: (1) berfungsi sebagai forum diskusi dan pertukaran pengalaman; (2) memperkuat solidaritas dan jaringan kolaborasi eksternal; (3) menyelenggarakan pelatihan pengembangan kapasitas di bidang teknologi, ilmu agama, komunikasi, dan keterampilan sosial; serta (4) meningkatkan legitimasi kinerja dan eksistensi penyuluh Non-PNS. Peran-peran tersebut telah berkontribusi pada transformasi kerja mereka yang semula bersifat individual dan terbatas menjadi lebih terstruktur, kolaboratif, dan berdampak luas. Namun, efektivitas FKPAI dibatasi oleh beberapa faktor penghambat, di antaranya keterlibatan dan motivasi anggota yang tidak merata, dinamika kebijakan dan regulasi yang kompleks (termasuk munculnya organisasi profesi saingan), keterbatasan pendanaan yang bersifat kronis, serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa FKPAI, sebagai organisasi profesi yang tumbuh dari bawah, memiliki relevansi strategis dalam memberdayakan penyuluh agama Non-PNS, namun memerlukan pengelolaan internal yang lebih sistematis dan dukungan eksternal yang lebih kuat untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitasnya.

Kata Kunci: Organisasi Profesi, Efektivitas Kinerja, Penyuluh Agama Islam, FKPAI, Penyuluh Non-PNS.

Abstract: This descriptive qualitative study aims to analyze the role of the Islamic Religious Instructors Communication Forum (FKPAI) as a professional organization in improving the performance and implementation of activities of Non-Civil Servant Islamic Religious Instructors (PAI Non-PNS) in Kendari City. Data were collected through observation, in-depth interviews with administrators and active members of FKPAI Kendari, and documentation study, and then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings indicate that FKPAI plays a significant and multi-faceted role through: (1) functioning as a discussion forum and experience exchange platform; (2) strengthening solidarity and external collaboration networks; (3) organizing capacity-building training in technology, religious knowledge, communication, and social skills; and (4) enhancing the performance legitimacy and existence of Non-PNS instructors. These roles have contributed to the transformation of their work from individualistic and limited scopes to more structured, collaborative, and impactful practices. However, the effectiveness of FKPAI is constrained by several inhibiting factors, including uneven member involvement and motivation, complex policy and regulatory dynamics (including the emergence of a rival professional organization), chronic funding limitations, and a lack of adequate facilities and infrastructure. This research concludes that FKPAI, as a bottom-up professional organization, has strategic relevance in empowering Non-PNS religious instructors, but requires more systematic internal management and stronger external support to ensure its sustainability and effectiveness.

Keywords: Professional Organization, Performance Effectiveness, Islamic Religious Instructors, FKPAI, Non-Civil Servant Instructors.

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia merupakan fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, peran keagamaan menjadi salah satu pilar penting dalam proses nation building. Penyuluh Agama Islam (PAI) hadir sebagai ujung tombak yang

menjembatani nilai-nilai ajaran Islam dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Mereka berperan tidak hanya sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual, konselor keluarga, dan bahkan agen perubahan sosial di tengah kompleksitas problematika masyarakat modern. Profesi ini memiliki signifikansi strategis dalam membentuk mentalitas dan moralitas bangsa, khususnya dalam merespons tantangan zaman seperti radikalisme, intoleransi, degradasi moral, dan krisis identitas keagamaan.

Secara kelembagaan, profesi penyuluh agama Islam di Indonesia terbagi dalam dua klasifikasi utama berdasarkan status kepegawaiannya. Pertama, Penyuluh Agama Islam Fungsional yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di bawah koordinasi langsung Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Kedua, Penyuluh Agama Islam non-PNS yang merupakan tenaga honorer yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten/Kota. Data statistik Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 mengungkapkan fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan: dari total 49.818 penyuluh agama Islam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sebanyak 45.000 orang (sekitar 90,3%) merupakan penyuluh non-PNS, sementara sisanya hanya 4.818 orang (9,7%) yang berstatus PNS. Disparitas angka yang begitu signifikan ini menunjukkan sebuah realitas bahwa beban utama dalam pembinaan keagamaan masyarakat justru ditanggung oleh para penyuluh dengan status kepegawaian yang paling rentan secara struktural dan finansial.

Tantangan yang dihadapi oleh para Penyuluh Agama Islam non-PNS ini bersifat multidimensional dan kompleks. Di satu sisi, mereka harus menghadapi tuntutan profesionalitas yang semakin tinggi seiring dengan dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 504 Tahun 2022, seorang penyuluh agama Islam non-PNS dituntut untuk memiliki spesialisasi dalam berbagai bidang kontemporer seperti pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, penguatan keluarga sakinah, pengelolaan zakat dan wakaf, kerukunan umat beragama, produk halal, pencegahan gerakan radikal dan aliran sesat, penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS, anti korupsi, moderasi beragama, haji dan umrah, serta pemberdayaan ekonomi umat. Di sisi lain, sebagai tenaga honorer dengan penghasilan yang sangat terbatas dan tidak tetap, mereka menghadapi keterbatasan akses terhadap pengembangan kapasitas profesional, minimnya jaminan sosial, dan rendahnya pengakuan formal terhadap eksistensi mereka dalam sistem birokrasi keagamaan. Kondisi paradoks ini menciptakan kesenjangan yang serius antara harapan ideal terhadap peran penyuluh agama dengan kapasitas riil yang dapat mereka berikan.

Dalam konteks permasalahan struktural ini, kehadiran organisasi profesi muncul sebagai sebuah mekanisme alternatif yang diharapkan dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh para penyuluh agama Islam non-PNS. Secara teoritis, organisasi profesi berfungsi sebagai wadah pengembangan kompetensi profesional, perlindungan hak-hak anggotanya, dan penjaga standar etika profesi (Prayoga, 2019). Lebih dari itu, organisasi profesi juga berperan sebagai medium advokasi kolektif untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya di hadapan pemangku kebijakan. Bagi para Penyuluh Agama Islam non-PNS, organisasi profesi yang secara khusus menaungi mereka adalah Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Nasional pertama pada bulan Mei 2010 di Jakarta. Organisasi ini didirikan dengan asas Islam dan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, dengan status independen sebagai mitra Kementerian Agama RI dalam melaksanakan program-program kerja.

Kota Kendari, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, menjadi konteks spasial yang menarik untuk mengkaji efektivitas peran FKPAI sebagai organisasi profesi. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kota Kendari, komposisi penyuluh agama Islam di kota ini menunjukkan ketimpangan yang serupa dengan pola nasional: dari total 93 penyuluh agama

Islam, sebanyak 80 orang (86%) merupakan penyuluh non-PNS, sementara hanya 13 orang (14%) yang berstatus PNS. Dengan luas wilayah 300,89 km² dan jumlah penduduk 404.000 jiwa (di mana 267.064 jiwa beragama Islam), Kota Kendari membutuhkan peran penyuluh agama yang efektif untuk mewujudkan visi "Kendari Bertakwa" yang menjadi slogan pembangunan kota. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: B-7716/Kw.24.6/1/BA.03.2/01/2020 tanggal 28 Januari 2020, FKPAI Kota Kendari telah resmi dibentuk dan diharapkan dapat menjadi wadah yang memfasilitasi peningkatan kinerja ke-80 penyuluh non-PNS tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan dasar teoretis mengenai pentingnya organisasi profesi dalam pengembangan kapasitas profesional. Alwayah dkk (2019) dalam penelitiannya tentang "Kontribusi Pengalaman Kerja dan Keaktifan Organisasi Profesi Terhadap Kompetensi Humanis Direktif Guru Bimbingan dan Konseling di Kabupaten Brebes" menemukan bahwa partisipasi aktif dalam organisasi profesi secara signifikan meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal dan pendekatan humanis para guru. Penelitian serupa oleh Rizal Gani Kaharuddin (2019) tentang "Kontribusi Ikatan Sarjana Ilmu Pustakawan dan Informasi Indonesia dalam Pengembangan Profesionalisme Pustakawan" mengungkapkan bahwa organisasi profesi berperan penting dalam memperjuangkan pengakuan profesi pustakawan serta meningkatkan kompetensi keilmuan anggotanya. Ahmad Muradi (2016) dalam penelitiannya tentang "Pengembangan Kompetensi Guru Bahasa Arab melalui IMLA sebagai Organisasi Profesi" juga menemukan bahwa organisasi profesi menjadi wahana efektif bagi pengembangan kompetensi pedagogis dan profesional guru bahasa Arab melalui berbagai kegiatan pelatihan, seminar, dan workshop.

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menyoroti dinamika organisasi profesi dalam konteks profesi keagamaan, khususnya penyuluh agama Islam non-PNS. Kesenjangan penelitian ini terletak pada belum adanya eksplorasi mendalam mengenai bagaimana organisasi profesi yang bersifat spesifik dan relatif baru seperti FKPAI beroperasi di tingkat lokal, program-program konkret apa yang dilaksanakan, bagaimana mekanisme kerjanya, sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kinerja anggota, serta hambatan-hambatan struktural dan kultural apa yang dihadapi dalam konteks sistem birokrasi keagamaan di Indonesia. Penelitian ini berusaha mengisi celah akademik tersebut dengan fokus pada FKPAI Kota Kendari sebagai studi kasus.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini dirumuskan dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran FKPAI Kota Kendari sebagai organisasi profesi dalam meningkatkan kinerja dan kegiatan penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh para PAI non-PNS. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas FKPAI dalam menjalankan perannya sebagai organisasi profesi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, manajemen organisasi non-profit, dan sosiologi profesi, khususnya terkait dengan dinamika organisasi profesi di sektor keagamaan. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi pengurus FKPAI, para penyuluh agama Islam non-PNS, serta pemangku kebijakan di Kementerian Agama Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam memberdayakan penyuluh agama melalui organisasi profesi, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, moderat, dan sejahtera sesuai dengan visi pembangunan nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) sebagai organisasi profesi dalam meningkatkan kinerja Penyuluh Agama Islam (PAI) Non-PNS di Kota Kendari.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang terkait dengan implementasi peran organisasi profesi dalam konteks nyata di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur dengan pengurus FKPAI Kota Kendari, anggota aktif, pembina dari Kantor Kementerian Agama, serta perwakilan FKPAI tingkat provinsi. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan FKPAI seperti rapat koordinasi, pelatihan, dan diskusi kelompok untuk memahami interaksi dan proses yang terjadi secara langsung. Data sekunder diperoleh dari analisis dokumentasi berupa AD/ART FKPAI, surat keputusan, notulensi rapat, laporan kegiatan, dan publikasi di media sosial.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait peran FKPAI, program unggulan, faktor pendukung, serta hambatan yang dihadapi. Hasil analisis kemudian dideskripsikan secara naratif untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai kontribusi FKPAI dalam meningkatkan kinerja PAI Non-PNS, sekaligus mengungkap kompleksitas dan tantangan yang melekat dalam pelaksanaan peran organisasi profesi di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) sebagai Organisasi Profesi dalam Meningkatkan Kinerja Penyuluh Agama Islam (PAI) Non-PNS di Kota Kendari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKPAI Kota Kendari menjalankan peran yang multifaset dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja para PAI Non-PNS. Peran tersebut termanifestasi dalam beberapa bentuk kegiatan dan dampak yang teridentifikasi sebagai berikut:

Sebagai Wadah Pertukaran Pengalaman dan Diskusi

FKPAI berfungsi sebagai platform utama bagi para PAI Non-PNS untuk saling berbagi informasi, strategi, dan pengalaman praktis dari lapangan. Forum diskusi rutin memungkinkan terjadinya proses pembelajaran kolektif. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu anggota, Sarianton, “FKPAI ini wadah kami untuk bertukar pengalaman dan berdiskusi... mungkin ada hal-hal yang tidak kita tahu jadi tahu, jadi kita belajar bersama.” Pertukaran ini mencakup berbagai hal, mulai dari metode efektif pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) hingga penanganan kasus-kasus spesifik di masyarakat. Aktivitas seperti pengajian keliling antar kecamatan yang diadakan FKPAI juga menjadi media praktis untuk berbagi teknik dan materi dakwah.

Penguatan Solidaritas dan Jaringan Kolaborasi

Keberadaan FKPAI berhasil memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah di antara para penyuluh. Ketua FKPAI Kota Kendari, Nanang Abdul Mukti, menyatakan bahwa FKPAI menjadikan ikatan sesama penyuluh “semakin baik dan lebih terasa”. Solidaritas ini menjadi fondasi bagi terbentuknya kerjasama yang lebih erat, baik internal FKPAI maupun dengan pihak eksternal. Contoh nyata adalah kolaborasi antara penyuluh dengan spesialisasi Narkoba dan HIV/AIDS dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari untuk menyelenggarakan sosialisasi dan workshop pencegahan.

Fasilitator Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan

Pelatihan Pengembangan Teknologi dan Digitalisasi

FKPAI menyelenggarakan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dasar dan keterampilan spesifik seperti desain grafis menggunakan Canva serta editing video dan foto. Tujuannya agar para penyuluh dapat memproduksi konten dakwah digital yang menarik

dan memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan syiar.

Pembinaan Keterampilan Ilmu Agama

FKPAI memfasilitasi peningkatan kapasitas keagamaan dasar melalui program rutin seperti tadarus dan tahsin Al-Qur'an untuk memperbaiki bacaan dan tajwid.

Peningkatan Kompetensi Komunikasi (Public Speaking)

FKPAI mengadakan forum latihan ceramah, baik dalam setting internal antar anggota maupun dengan turun langsung ke majelis ta'lim binaan. Para penyuluh yang memiliki spesialisasi tertentu juga diminta untuk mempresentasikan materinya di depan rekan sejawat.

Pengembangan Keterampilan Sosial dan Jaringan

FKPAI mendorong anggotanya untuk aktif membangun relasi dan berkolaborasi dalam kegiatan sosial. Inisiatif seperti "FKPAI Care", sebuah program bantuan sosial untuk fakir miskin yang dilakukan bekerjasama dengan perusahaan seperti PLN, merupakan contoh nyata.

Peningkatan Kinerja dan Ekspansi Peran Penyuluh

Keanggotaan di FKPAI memberikan dampak nyata terhadap perubahan kinerja dan perluasan peran para PAI Non-PNS. Sebelum bergabung, banyak penyuluh yang merasa tugas mereka hanya terbatas pada mengajar mengaji di TPQ atau majelis ta'lim. Setelah mendapatkan pembinaan dan dukungan dari FKPAI, persepsi dan kapasitas mereka berkembang. Sebagaimana diungkapkan Uminiswati, seorang anggota, setelah bergabung dengan FKPAI para penyuluh mulai memahami bahwa peran mereka "bukan hanya sekedar guru ngaji melainkan menjadi pemecah masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat." Mereka menjadi lebih percaya diri untuk terlibat aktif dalam berbagai forum kemasyarakatan dan bahkan masuk ke wilayah-wilayah dakwah yang lebih kompleks seperti rumah sakit jiwa dan rumah tahanan.

Faktor-Faktor Penghambat Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) sebagai Organisasi Profesi

Keterlibatan dan Motivasi Anggota yang Berfluktuasi

Tingkat partisipasi aktif anggota masih rendah. Dari sekitar 80 PAI Non-PNS di Kota Kendari, hanya 20-40% yang secara konsisten terlibat dalam kegiatan FKPAI. Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh latar belakang dan kesibukan anggota yang beragam, serta kecenderungan semangat yang hanya tinggi di awal ("panas-panas tai ayam").

Kebijakan dan Regulasi yang Menimbulkan Dualisme Kelembagaan

Kebijakan pemerintah, khususnya pembentukan organisasi profesi baru bernama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI), menciptakan ketidakpastian. IPARI yang bersifat lintas agama dan diusung secara formal oleh Kementerian Agama, menarik perhatian dan keanggotaan para penyuluh, termasuk yang sebelumnya aktif di FKPAI. Kondisi ini menyebabkan "ketidaksinkronan" dan membuat FKPAI cenderung menjadi pasif.

Keterbatasan Anggaran dan Pendanaan

Kendala finansial merupakan hambatan struktural yang paling sering dihadapi. Sebagai organisasi yang menaungi para penyuluh berstatus honorer dengan penghasilan terbatas, FKPAI kesulitan mengumpulkan iuran anggota yang memadai. Sementara itu, kegiatan lapangan memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit.

Minimnya Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung

FKPAI Kota Kendari belum memiliki sekretariat atau kantor tetap yang dapat dijadikan sebagai basis operasional dan tempat berkumpul rutin para anggota. Minimnya fasilitas pendukung seperti ruang rapat dan perangkat administrasi membuat kegiatan organisasi sering bergantung pada inisiatif personal dan fasilitas pinjaman

Pembahasan

Temuan penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika organisasi profesi di tingkat akar rumput, khususnya dalam konteks profesi keagamaan non-

formal. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teoritis dan temuan penelitian terdahulu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

FKPAI sebagai Aktualisasi Fungsi Ideal Organisasi Profesi

Temuan bahwa FKPAI berperan sebagai wadah pertukaran pengalaman, peningkatan kompetensi, dan penguatan solidaritas secara tepat merefleksikan fungsi fundamental organisasi profesi. Menurut Prayitno (dalam Khusnul Wardan, 2019), tri fungsi organisasi profesi adalah pengembangan ilmu, peningkatan mutu layanan, dan penjagaan kode etik. FKPAI Kota Kendari telah mengaktualisasikan ketiganya: (a) Pengembangan ilmu dilakukan melalui diskusi rutin yang menjadi forum peer learning untuk mengkaji kasus dan metode penyuluhan, serta pelatihan teknologi yang mengakomodasi perkembangan ilmu komunikasi digital; (b) Peningkatan mutu layanan dicapai melalui pembinaan keterampilan inti penyuluh (ilmu agama, public speaking) yang langsung berdampak pada kualitas interaksi dengan masyarakat; (c) Penjagaan kode etik tidak hanya berupa pengawasan normatif, tetapi dibangun melalui ikatan solidaritas (ukhuwah Islamiyah) yang menciptakan kontrol sosial dan komitmen bersama di antara anggota. Temuan ini menguatkan pendapat Darmodiharjo dan Shidarta (1995) bahwa organisasi profesi berperan langsung dalam merealisasikan kompetensi dan praktik pelayanan anggotanya.

Transformasi Peran: Dari Instruktur menjadi Agen Perubahan Sosial

Salah satu temuan krusial adalah perubahan paradigma dan ekspansi peran penyuluh setelah bergabung dengan FKPAI. Sebelumnya, banyak PAI Non-PNS memandang diri sekadar sebagai “guru ngaji” dengan tugas terbatas pada pengajaran baca tulis Al-Qur’an. Intervensi FKPAI melalui berbagai program telah melakukan reframing terhadap identitas profesional mereka. Penyuluh kini dilihat—dan melihat diri mereka sendiri—sebagai “pemecah masalah masyarakat” yang mampu masuk ke ranah yang lebih kompleks seperti penanganan narkoba, kerukunan umat, dan isu sosial lainnya. Transformasi ini selaras dengan konsep peran penyuluh menurut Haverlock (dalam Ulin Nihayah, 2020), yaitu sebagai motivator, fasilitator, pemecah masalah, dan penghubung antarsistem. FKPAI berhasil memfasilitasi peralihan peran dari yang bersifat instruksional-edukatif semata ke arah peran yang lebih konsultatif dan advokatif. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi profesi tidak hanya meningkatkan skill, tetapi juga membentuk mindset dan identitas profesional anggotanya.

Respons terhadap Disrupsi Digital: Strategi Adaptif FKPAI

Fokus FKPAI pada pelatihan teknologi dan digitalisasi bukanlah langkah yang sembarangan, melainkan respons strategis terhadap dua tekanan sekaligus: tuntutan era digital dan perubahan perilaku masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prayoga (2018) yang mengungkap transformasi metode penyuluhan akibat kemajuan TIK. Dalam konteks yang lebih spesifik, langkah FKPAI ini merupakan implementasi konkret dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang optimalisasi media sosial dalam bimbingan dan penyuluhan. Pelatihan desain grafis dan editing video mengakomodasi teori hypermedia dan konvergensi media dalam dakwah, memungkinkan pesan keagamaan dikemas secara lebih menarik dan tersebar lebih luas. Dengan demikian, FKPAI tidak hanya mempersenjatai anggotanya dengan alat (tools) baru, tetapi juga mendorong evolusi model dakwah dari konvensional tatap muka menuju model hibrid yang menggabungkan pendekatan luring dan daring. Ini membuktikan kapasitas organisasi profesi lokal untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, sebagaimana dikemukakan Abdul Rahma (dalam Sulfiana dkk, 2024) tentang pentingnya penyuluh agama menguasai perangkat digital.

Solidaritas sebagai Modal Sosial dan Strategi Kolaborasi

Penguatan solidaritas diinternal FKPAI menghasilkan apa yang dalam teori sosial disebut sebagai modal sosial (social capital) yang tinggi, berupa jaringan kepercayaan dan norma timbal balik yang kuat di antara anggota. Modal sosial ini kemudian dikonversi menjadi

akses terhadap sumber daya eksternal. Kolaborasi dengan BNN Kota Kendari adalah contoh nyata. Solidaritas internal menciptakan kolektivitas yang lebih mudah diidentifikasi dan diajak kerjasama oleh institusi eksternal. Hal ini mendukung pendapat Emile Durkheim bahwa solidaritas adalah kebutuhan mutlak kelompok untuk menjaga eksistensinya. Lebih jauh, mekanisme ini menunjukkan fungsi FKPAI sebagai bridging agent yang menghubungkan para penyuluh (sebagai tenaga profesional di lapangan) dengan pemangku kepentingan lain (sebagai pemilik sumber daya dan kebijakan). Strategi kolaborasi ini merupakan bentuk cerdas dari organisasi profesi dengan sumber daya terbatas untuk memperbesar dampak kerjanya.

Analisis Hambatan: Konflik Kelembagaan dan Dilema Sumber Daya

Hambatan yang dihadapi FKPAI mencerminkan dilema mendalam organisasi profesi pada sektor publik yang belum sepenuhnya termanajerialisasi.

Dualisme Kelembagaan (IPARI vs. FKPAI)

Munculnya IPARI sebagai organisasi profesi “resmi” yang diusung pemerintah menciptakan apa yang diistilahkan sebagai institutional crowding. Situasi ini bukan sekadar persaingan, tetapi lebih pada ketidakjelasan hirarki dan legitimasi. FKPAI, yang dibentuk dari bawah (grassroot) berdasarkan kebutuhan praktisi, harus berhadapan dengan IPARI yang dibentuk dari atas (top-down) berdasarkan pertimbangan birokrasi. Konflik ini berpotensi melemahkan loyalitas anggota dan memecah konsentrasi pengembangan profesi. Menurut Alfandri (2019), penguatan legitimasi memerlukan pengakuan multipihak. Oleh karena itu, FKPAI perlu secara aktif membangun legitimasinya tidak hanya di mata anggota, tetapi juga di mata pemangku kebijakan lokal.

Keterbatasan Finansial dan Infrastruktur

Kedua hambatan ini saling berkait dan bersumber dari status ekonomi anggota yang umumnya sebagai honorer. Temuan bahwa iuran sulit dan dana terbatas sejalan dengan penelitian Yanto & Zaky (2023) yang menegaskan bahwa keberlanjutan lembaga sangat bergantung pada ketersediaan sumber dana. Ketiadaan sekretariat permanen lebih dari sekadar masalah fasilitas; ini adalah masalah simbolis yang berdampak pada stabilitas, profesionalitas, dan citra organisasi. Seperti dinyatakan Siagian (dalam Purwanto, 2019), keterbatasan sarana menuntut pemberdayaan yang maksimal, yang berarti FKPAI harus lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya jejaring dan kolaborasinya untuk mengatasi kendala ini.

Partisipasi yang Rendah

Rendahnya partisipasi yang kronis (hanya 20-40% anggota aktif) mengindikasikan masalah motivasi intrinsik dan desain keanggotaan. Paton (dalam Purwati, 2018) menyatakan motivasi dipengaruhi faktor individu dan situasi. FKPAI perlu mengevaluasi apakah manfaat keanggotaan yang dirasakan sudah seimbang dengan tuntutan dan waktu yang harus dikorbankan oleh para penyuluh yang juga memiliki multiperan ini. Mungkin diperlukan pendekatan keanggotaan yang lebih fleksibel atau sistem insentif non-material yang lebih kuat

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang organisasi profesi di luar sektor formal yang telah mapan (seperti dokter atau pengacara). Ini menunjukkan bahwa organisasi profesi di sektor non-PNS/ honorer punya karakter unik: sangat bergantung pada modal sosial dan inisiatif kolektif, sangat rentan terhadap kebijakan eksternal, namun memiliki ketangguhan dan relevansi yang tinggi di tingkat akar rumput.

Secara praktis, temuan ini menyiratkan beberapa hal:

- Bagi FKPAI dan organisasi profesi sejenis, kunci keberlanjutan terletak pada kemampuan mengkonsolidasikan legitimasi melalui kinerja nyata, membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan, serta mengelola ekspektasi dan keterlibatan anggota dengan lebih baik.
- Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama, temuan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang koheren dan tidak tumpang tindih dalam mendukung organisasi profesi

penyuluh. Alih-alih menciptakan organisasi baru yang dapat melemahkan yang sudah ada, kebijakan yang lebih konstruktif adalah mengakui dan memperkuat kapasitas organisasi yang telah terbukti efektif di lapangan seperti FKPAI, sambil memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas yang memadai.

- Bagi PAI Non-PNS, penelitian ini menegaskan bahwa keaktifan dalam organisasi profesi bukanlah beban tambahan, melainkan investasi untuk peningkatan kapabilitas, perluasan jaringan, dan penguatan posisi tawar mereka secara profesional.

Kesimpulannya, meskipun bergulat dengan berbagai keterbatasan sumber daya dan tantangan kelembagaan, FKPAI Kota Kendari telah membuktikan dirinya sebagai ruang belajar, ruang kolaborasi, dan ruang advokasi yang efektif bagi para PAI Non-PNS. Keberhasilannya meningkatkan kinerja penyuluh menunjukkan bahwa dalam konteks pembangunan masyarakat, organisasi profesi berbasis komunitas dapat menjadi motor penggerak yang sangat powerful, asalkan mendapatkan pengakuan dan dukungan ekosistem yang tepat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kota Kendari berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja Penyuluh Agama Islam (PAI) Non-PNS. Peran tersebut diwujudkan melalui empat fungsi kunci: sebagai forum diskusi dan pertukaran pengalaman, penguat solidaritas dan jejaring kolaborasi eksternal, penyelenggara pelatihan kompetensi (teknologi, agama, komunikasi, sosial), serta katalisator peningkatan kapabilitas dan legitimasi profesi. Namun, efektivitasnya dibatasi oleh sejumlah hambatan utama, yaitu partisipasi dan motivasi anggota yang rendah dan tidak berkelanjutan; dinamika kebijakan yang kompleks, termasuk munculnya organisasi profesi saingan (IPARI) yang didukung pemerintah pusat; serta keterbatasan kronis dalam pendanaan dan fasilitas infrastruktur.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan geografis yang hanya pada satu kota dan pendekatan kualitatif yang belum mengukur dampak secara kuantitatif. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan studi ke tingkat provinsi atau nasional, serta menggunakan pendekatan mixed-method untuk mengukur dampak objektif keikutsertaan dalam FKPAI terhadap indikator kinerja yang lebih terukur. Penelitian mendatang juga dapat menyelidiki model kelembagaan organisasi profesi sejenis yang berhasil bertahan dan berkembang dengan sumber daya terbatas, sebagai referensi penguatan FKPAI.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiandri, A., Akbar., D., & Ikhsan, K. (2019). Collaborative Government: Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan dalam Dunia Investasi. UmrahPress
- Alwayah, dkk. (2019). Kontribusi Pengalaman Kerja dan Keaktifan Organisasi Profesi Terhadap Kompetensi Humanis Direktif Guru Bimbingan dan Konseling di Kabupaten Brebes. *Jurnal Ilmiah*.
- Azhari, D. S., & Usman, U. (2022). Etika profesi dalam perspektif Islam. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 5(1), 6-13.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. (2017). Pedoman Umum Penyuluh Agama Islam Non PNS.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. (2022). Data Pokok Penyuluh Agama Islam.
- FKPAI. (2010). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam.
- Gani, R. K. (2019). Kontribusi Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia dalam Pengembangan Profesionalisme Pustakawan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(4), 140-149.
- Gunawan, I. (2013). Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Agama RI. (2014). Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya. Surabaya: Halim.

- Lorita, E., Saputra, H. E., Yusuarsono, Y., Imanda, A., Sariningsih, M., Kader, B. A. C., & Mirwansyah, M. (2023). Menumbuhkan Rasa Solidaritas Dalam Organisasi. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 2(2), 157-162.
- Marsidi, Sutrisno, E., Wachidah, W. N. L., Allamah, N., & Kartikaningsih, Y. (2021). *Penyuluh Agama sebagai Agen Perubahan dalam Praktik Moderasi Beragama*. Indonesia: Guepedia.
- Muis. (2017). *Penyuluh Agama Islam: Profesi dan Perannya dalam Masyarakat*. Penerbit Litera.
- Muradi, A. (2016). Pengembangan Kompetensi Guru Bahasa Arab melalui IMLA sebagai Organisasi Profesi. *Arabi: Journal of Arabic Studies*, 1(2), 1-10.
- Nihayah, U. (2020). Efektivitas Cyber Extension pada Penyuluh Agama di Kota Semarang. *Jurnal Bimas Islam*, 13(2), 45-60.
- Nofriansyah, D. (2018). *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurmayanti, E., Handayani, F. D., & Indiriawati, P. (2023). Peran Organisasi Profesi Guru di SMP PGRI 7 Balikpapan. *Journal Fusion*, 3(2), 163-177.
- Prayoga, M. D. (2019). Definisi dan Fungsi dari Organisasi Profesi. *Jurnal of Chemical Information and Modeling*, 1-11.
- Purwati, A. E. (2018). *Motivasi Kerja dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Rusdinal, & Afriansyah, H. (2021). *Manajemen Organisasi Nirlaba*. Penerbit Alfabeta.
- Sazali, H. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardan, K. (2019). *Guru sebagai Profesi*. Yogyakarta: Deepublish.